

KAJIAN KRIMINOLOGIS MENGENAI PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DI LAKUKAN OLEH ANAK

Gusti Ngurah Alit Ardiyasa/D 101 10 102

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di kota palu, (2) serta upaya yang dilakukan pihak kepolisian untuk menanggulangi terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak tersebut. Penelitian ini dilaksanakan di Polres Kota Palu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan permasalahan mengenai hal-hal yang bersifat yuridis dan kenyataan yang ada mengenai pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak.

Penelitian juga dilakukan berdasarkan teori-teori hukum yang ada, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun pendapat para sarjana dan ahli. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak masih sering terjadi faktor-faktor yang menyebabkan tingginya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak yaitu faktor keluarga, faktor pendidikan dan sekolah dan faktor pergaulan atau lingkungan. sementara upaya yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian untuk menanggulangi jumlah pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak antara lain upaya Upaya Pre-emptif disini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana, preventif yaitu melakukan sosialisasi penyuluhan tertib berlalu lintas dan upaya represif yaitu untuk menindak langsung anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas dan berguna untuk memberi efek jera terhadap anak sekolah yang melakukan pelanggaran.

kata kunci : kajian, kriminologi, pelanggaran lalu lintas, anak.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Banyak sekali dijumpai permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran lalu lintas, mulai dari yang ringan hingga

yang berat¹. Pelanggaran lalu lintas terjadi dimana-mana, baik di kota-kota besar maupun kota-

¹ Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung : Refika Aditama, 2003, hlm 20

kota kecil dalam berbagai macam bentuk.

Pelaku pelanggaran lalu lintas mulai dari anak-anak, dewasa, hingga lansia, berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku melanggar lalu lintas tidak lagi distereotipe-kan pada figur tertentu. Setiap generasi dapat melakukan perilaku pelanggaran lalu lintas.

Aparat penegak hukum (polisi lalu lintas) berperan sebagai pencegah (*politie toezicht*) dan sebagai penindak (*politie dwang*) dalam fungsi politik. Di samping itu polisi lalu lintas juga melakukan fungsi *regeling* (misalnya, pengaturan tentang kewajiban bagi kendaraan bermotor tertentu untuk melengkapi dengan segitiga pengaman) dan fungsi *bestuur* khususnya dalam hal perizinan atau *begunstiging* (misalnya,

mengeluarkan Surat Izin Mengemudi)².

Tinjauan utama dari peraturan lalu lintas adalah untuk mempertinggi mutu kelancaran dan keamanan dari semua lalu lintas di jalan-jalan. Identifikasi masalah-masalah yang dihadapi di jalan raya berkisar pada lalu lintas.

Selama ini belum banyak disadari bahwa pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu jenis tindak pidana. Suatu pelanggaran dikatakan termasuk tindak pidana bila pelanggaran itu memenuhi semua unsur tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana tersebut adalah perbuatan manusia yang mampu bertanggung jawab, perbuatan itu melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, dan diancam dengan pidana.

² Soerjono Soekanto 2, Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah – Masalah Sosial, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1989, hlm 58

Mengingat pentingnya ketertiban lalu lintas demi kelancaran dan keselamatan para pengguna jalan pada umumnya, maka perlu diupayakan tumbuhnya semangat untuk menaati aturan, semangat untuk menjaga ketertiban, dan menghormati hak orang lain dalam berlalu lintas. Selain itu, dengan langkah-langkah penegakan hukum oleh polri diharapkan akan tercipta keadaan tertib hukum dibidang lalu lintas dan angkutan jalan raya sehingga berbagai pelanggaran lalu lintas dapat ditekan jumlahnya seminimal mungkin. Oleh karena itu penting pula kiranya bahwa kepolisian pun perlu meningkatkan kedisiplinan anggotanya.

Banyaknya kasus tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Kota Palu yang dilakukan oleh masyarakat dan khususnya dilakukan oleh anak, melatarbelakangi peneliti untuk

menyusun skripsi yang berjudul **“Kajian Kriminologis Mengenai Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak”**

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang akan di bahas oleh penulis adalah :

1. Apa faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas yang di lakukan oleh anak?
2. Apa upaya pihak kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang di lakukan oleh anak?

II. PEMBAHASAN

A. Tinjauan Teoritis dan Konsepsional

Istilah Kriminologi pertama kali digunakan oleh P. Topinard, seorang ahli antropologi perancis (1830-1911). Kriminologi mengandung arti

yaitu suatu ilmu yang mempelajari kejahatan. Secara etimologis istilah kriminologi berasal dari kata *crimen* (kejahatan) dan *logos* (pengetahuan atau ilmu pengetahuan).

Secara umum, tujuan dari Kriminologi itu yakni untuk mempelajari kejahatan dari berbagai aspek, sehingga pemahaman mengenai fenomena kejahatan bisa diperoleh dengan baik. Berkembangnya Kriminologi dan semakin maraknya pemikiran-pemikiran kritis yang mempelajari proses pembuatan Undang-undang, untuk itu sangatlah penting bagi mahasiswa Fakultas Hukum untuk mempelajari Kriminologi, agar dapat memperoleh pemahaman yang baik tentang fenomena kejahatan dan juga masalah hukum pada umumnya.

Pengertian kriminologi menurut beberapa para ahli :

W. A. Bonger memberikan definisi “Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.”

WME. Noach memberikan definisi “Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab-musabab serta akibat-akibatnya.”

J. Constan memberikan definisi “Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan dan penjahat.”

Anak merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan

Nasional. Anak adalah asset bangsa, masa depan bangsa dan negara dimasa yang akan datang berada ditangan anak sekarang. Semakin baik keperibadian anak sekarang maka semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa. Begitu pula sebaliknya, apabila keperibadian anak tersebut buruk maka akan bobrok pula kehidupan bangsa yang akan datang.

a. Pengertian Anak Dari Aspek Agama: Dalam pengertian Islam, anak adalah titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat bangsa dan negara yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai rahmatan lila'lamin dan sebagai pewaris ajaran islam pengertian ini mengandung arti bahwa setiap anak yang dilahirkan harus diakui, diyakini, dan diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh akan dari

orang tua, masyarakat, bangsa dan negara.

- b. Pengertian Dari Aspek Ekonomi: Dalam pengertian ekonomi, anak dikelompokkan pada golongan non produktif. Kelompok pengertian anak dalam bidang ekonomi mengarah pada konsepsi kesejahteraan anak sebagaimana yang ditetapkan oleh UU no. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak yaitu anak berhak atas kepeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan, dalam lingkungan masyarakat yang dapat menghambat atau membahayakan perkembangannya, sehingga anak tidak lagi menjadi korban dari ketidakmampuan ekonomi keluarga dan masyarakat.
- c. Pengerian Dari Apek Sosiologis: Dalam aspek sosiologis anak diartikan sebagai makhluk ciptaan

Allah SWT yang senantiasa berinteraksi dalam lingkungan masyarakat bangsa dan negara. Dalam hal ini anak diposisikan sebagai kelompok sosial yang mempunyai status sosial yang lebih rendah dari masyarakat dilingkungan tempat berinteraksi. Makna anak dalam aspek sosial ini lebih mengarah pada perlindungan kodrat anak itu sendiri.

- d. **Pengertian Anak dari Aspek Hukum:** Dalam hukum kita terdapat pluralisme mengenai pengertian anak. Hal ini adalah sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tersendiri mengenai peraturan anak itu sendiri. Pengertian anak dalam kedudukan hukum meliputi pengertian anak dari pandangan system hukum atau disebut kedudukan dalam arti khusus sebagai objek hukum. Jika dicermati, maka

secara keseluruhan dapat dilihat bahwa rentan usia anak terletak pada skala 0 sampai dengan 21 tahun ditetapkan berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial serta pertimbangan kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental seseorang yang umumnya dicapai setelah seseorang melampaui usia 21 tahun.

Dari beberapa pengertian dan batasan umur anak yang cukup bervariasi, kiranya menjadi perlu untuk menentukan dan menyepakati batasan umur anak secara jelas dan lugas agar nantinya tidak terjadi permasalahan yang menyangkut batasan umur anak itu sendiri. Dalam lingkup Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia serta Undang-undang tentang Perlindungan Anak sendiri ditetapkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai

usia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan belum pernah menikah.

Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas

Di dalam KUHP tidak dijelaskan mengenai arti pelanggaran. Pelanggaran dapat dibedakan dengan kejahatan melalui sanksi yang diberikan. Sanksi bagi pelaku pelanggaran umumnya lebih ringan dari pelaku kejahatan. “pelanggaran” adalah delik undang-undang (*wetsdelicten*) yaitu perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada undang-undang yang mengaturnya³. Maka suatu tindakan dinyatakan telah melanggar apabila akibat dari perbuatan itu menimbulkan adanya sifat melawan hukum dan telah ada aturan atau telah ada undang-undang yang

mengaturnya. Walaupun perbuatan itu telah menimbulkan suatu sifat melawan hukum namun belum dapat dinyatakan sebagai suatu bentuk pelanggaran sebelum diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kata “lalu lintas” dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah berjalan hilir mudik, berhubungan perjalanan (kendaraan dsb). Sedangkan pengertian lalu lintas dalam 1 angka 2 UU lalu lintas yaitu gerak kendaraan dan orang diruang lalu lintas jalan.

Pengertian lalu lintas dapat disimak dalam brosur penyuluhan hukum VIII tentang pelaksanaan lalu lintas yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Pembinaan Badan Peradilan Umum Departemen Kehakiman edisi 1 tahun 1993 yang selengkapya berbunyi :

³ Rusli Effendy dan Ny. Poppy Andi Lolo, 1989, hlm 74

“pelanggaran lalu lintas adalah setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pemakai jalan baik terhadap rambu-rambu lalu lintas maupun dalam cara mengemudi jalan. Orang yang menggunakan kendaraan bermotor maupun pejalan kaki”.

Jenis-jenis Pelanggaran Lalu Lintas

Jenis-jenis pelanggaran lalu lintas dalam surat keputusan Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tanggal 23 desember 1992 dinyatakan ada 27 jenis pelanggaran yang diklasifikasikan menjadi tiga bagian yaitu :

1. Klasifikasi pelanggaran ringan
Tertulis pada Pasal 275 (1), 276, 278, 279, 280, 282, 284, 285 ayat (1,2), 286, 287, 288 ayat (1,2,3),

289,290, 291 ayat (1,2), 292, 293 ayat (1,2), 294, 295, 298, 299, 300 huruf (a,b,c), 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308 huruf (a,b,c,d) UU No. 22 Tahun 2009.

2. Klasifikasi pelanggaran sedang

Tertulis pada Pasal 281, 283, 296, 297, 309, 313 UU No. 22 Tahun 2009.

3. Klasifikasi jenis pelanggaran berat

Tertulis pada Pasal 274, 275, UU No. 22 Tahun 2009.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata Polisi adalah suatu badan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintahan (pegawai negara yang bertugas menjaga

keamanan dan ketertiban)⁴.

Dalam menjalankan fungsinya polisi wajib memahami asas-asas yang telah ditentukan yang salah satunya yaitu asas subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membidangi⁵.

Tugas polisi lalu lintas adalah :

1) Operatif :

- a) Memeriksa kecelakaan lalu lintas
- b) Mengatur lalu lintas
- c) Menegakkan hukum lalu lintas.

2) Administratif :

- a) Mengeluarkan surat izin mengemudi
- b) Mengeluarkan surat tanda

kendaraan

bermotor membuat statisfic/grafik dan pengumpulan data yang berhubungan dengan lalu lintas.⁶

Fungsi polisi dibidang lalu lintas adalah :

1. Penegakan hukum lalu lintas (*Police Traffic Law Enforcement*), yang dapat bersifat preventif yaitu pengaturan, penjagaan, dan patroli lalu lintas dan represif yaitu penindakan hukum terhadap pelanggar lalu lintas dan penyidikan kecelakaan lalu lintas.
2. Pendidikan masyarakat tentang lalu lintas (*Police Traffic Education*).

⁴ Poerwagarnminto, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, hlm 84

⁵ Bisri Ilham, Sistem hukum Indonesia, Jakarta : Grafindo Persada, 1998, hlm 31.

⁶ <http://ml.scribd.com/doc/58869746/8/Tugas-polisi-Lalu-lintas> diakses pada tanggal 29 november 2014.

3. Enjinering lalu lintas
(*Police Traffic Engineering*).
4. Registrasi dan
identifikasi pengemudi
serta kendaraan
bermotor.

B. Faktor Penyebab Pelanggaran Lalu Lintas Yang Di Lakukan Oleh Anak

Suatu kriminologi mengkaji bahwa suatu pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dapat dipengaruhi dorongan dalam diri sendiri dan dorongan dari luar si anak tersebut.

Faktor pendorong dari dalam diri sendiri adalah sebagai berikut :

1. Faktor inteligensia

Inteligensia adalah kecerdasan seseorang. Dalam hal pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak faktor inteligensia ini

merupakan salah satu faktor pendukung dimana faktor yang mempengaruhi anak melakukan pelanggaran lalu lintas yaitu : perilaku seseorang tidak disiplin berlalu lintas.

2. Faktor usia

Faktor usia adalah faktor yang penting dalam hubungannya dengan sebab-sebab timbulnya kejahatan, tidak terkecuali kenakalan yang dilakukan oleh seorang anak. Secara kriminologi, dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan sejauh mana usia merupakan masalah yang penting dalam kaitan sebab-musabab kenakalan.

Faktor pendorong dari luar adalah sebagai berikut :

1. Faktor Keluarga

Keluarga merupakan lingkungan sosial yang

terdekat untuk membesarkan, mendewasakan, dan didalamnya anak mendapatkan pendidikan yang pertama dan utama. Oleh karena itu keluarga memiliki peranan yang penting dalam perkembangan anak. Peran keluarga sangat penting sekali dalam pengaruh pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak. Alasannya bila orang tua tidak membiarkan anaknya yang masih dibawah umur mengendarai sepeda motor maka peluang pelanggaran lalu lintas tidak terjadi. Penulis menyimpulkan bahwa anak berpotensi melakukan pelanggaran lalu lintas tidak terlepas dari adanya dukungan orang tua/keluarga, hal ini dapat dilihat ketika orang tua yang dengan sengaja mengajarkan anaknya mengendarai kendaraan bermotor di usia yang sangat dini.

2. Faktor Pendidikan dan Sekolah

Sekolah adalah media atau perantara bagi pembinaan jiwa para anak, atau dengan kata lain sekolah ikut bertanggung jawab terhadap pendidikan anak, baik pendidikan keilmuan maupun pendidikan tingkah laku. Banyaknya atau bertambahnya kenakalan anak secara tidak langsung menunjukkan kurang berhasilnya sistem pendidikan disekolah-sekolah. Dalam konteks demikian, Sekolah adalah tempat pendidikan anak ke-dua setelah lingkungan keluarga atau rumah tangga si anak itu sendiri. Selama mereka menempuh pendidikan disekolah, terjadi interaksi antara anak dan sesamanya, interaksi yang mereka lakukan disekolah sering menimbulkan efek samping

yang negative maupun positif terhadap perkembangan mental si anak.

3. Faktor Pergaulan atau Lingkungan Anak

Harus disadari betapa besar pengaruh lingkungan terhadap remaja, terutama dalam konteks kultural atau kebudayaan lingkungan tersebut. Anak menjadi delikuen/jahat karena banyak dipengaruhi oleh berbagai tekanan pergaulan yang semuanya memberikan pengaruh yang menekan dan memaksa pada pembentukan perilaku yang buruk, sebagai produknya para anak tadi suka melanggar peraturan, norma sosial dan hukum formal. Para anak menjadi delikuen/jahat sebagai akibat dari transformasi psikologis sebagai reaksi terhadap pengaruh eksternal yang

menekan dan memaksa sifatnya. Karena itu semakin luas anak bergaul semakin intensif relasinya dengan anak nakal, akan menjadi semakin lama pula proses berlangsungnya asosiasi deferensial tersebut dan semakin besar pula kemungkinan anak tadi benar-benar menjadi nakal. Dalam hal ini peranan orang tua untuk menyadarkan dan mengembalikan kepercayaan anak tersebut serta harga dirinya sangat diperlukan. Perlu mendidik anak agar bersifat formal dan tegas supaya mereka terhindar dari pengaruh-pengaruh yang datang dari lingkungan pergaulan yang kurang baik.

C. Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak

Upaya-upaya yang telah dilakukan pihak Polresta Palu antara lain :

1. Pre-emptif

Upaya Pre-emptif disini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana, sebagaimana hasil penelitian penulis, dalam wawancara terhadap salah seorang polisi anggota SATLANTAS Polresta Palu sebagai aparat hukum mengenai upaya kepolisian menanggulangi terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak. Salah satu caranya antara lain melaksanakan seminar, sosialisasi di sekolah-sekolah, melalui ceramah, penyuluhan guna memberikan pemahaman

etika berlalu lintas diusia dini.

2. Preventif

Preventif adalah tindak lanjut dari upaya pre-emptif. Dalam upaya pre-emptif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Dalam hal ini keberadaan polisi pada setiap pos keamanan yang berada di jalan-jalan sangatlah efektif dalam hal menutup kesempatan bagi para anak yang belum memiliki surat-surat untuk dapat membawa kendaraan bermotor di jalan. Selain itu juga dilakukan pengawasan dengan cara sweeping. Sweeping biasanya dilakukan pada saat ada penugasan dari atasan, yaitu dilakukan pada saat ramadhan (oprasi ketupat), pada saat natalan (oprasi lilin),

(oprasi simpatik) setiap 6 bulan sekali dan sweeping rutin (oprasi patuh).

3. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadinya tindak pidana atau kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman.

Dalam hal ini apabila polisi menemukan anak yang membawa sepeda motor maka polisi akan memberikan tilang terhadap anak tersebut.

Dengan cara tilang, anak tersebut akan tahu bahwa sebenarnya belum diperbolehkan untuk berkendara karena belum cukup umur dan belum tahu betul akibat jika berlalu lintas tidak sesuai dengan aturan, tilang tersebut merupakan upaya penanggulangan yang paling efektif.

Adapun ketika anak menggunakan sepeda motor dengan kecepatan tinggi dengan sengaja untuk menghindari petugas polisi maka polisi juga dapat menindaki anak tersebut dengan cara mengejar anak tersebut.

III.PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sekolah yakni sebagai berikut : pertama, faktor keluarga: anak melakukan pelanggaran lalu lintas tidak terlepas dari adanya dukungan orang tua/keluarga, semestinya mereka member pengawasan terhadap anak untuk tidak membawa kendaraan bermotor. Kedua, faktor pendidikan dan sekolah: Sekolah memiliki peran yang

sangat penting sehingga seharusnya sekolah memberi batasan kepada si anak dan melarang membawa kendaraan ke sekolah. Ketiga, faktor pergaulan atau lingkungan anak: Pergaulan dan lingkungan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap anak karena semakin luas anak bergaul semakin intensif relasinya dengan anak nakal dan akan mendapatkan dampak yang buruk terhadap anak tersebut.

2. Upaya yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak yaitu: pertama, Upaya Pre-emptif. disini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana, upaya yang dilakukan adalah dengan cara melaksanakan seminar, sosialisasi di sekolah-sekolah, melalui

ceramah, penyuluhan guna memberikan pemahaman etika berlalu lintas diusia dini. Kedua, Upaya Preventif. Preventif adalah tindak lanjut dari upaya pre-emptif. Dalam upaya pre-emptif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Upaya yang dilakukan yaitu dengan cara menempatkan polisi di setiap pos keamanan yang ada di jalan-jalan untuk menutup kesempatan bagi para anak yang belum memenuhi syarat untuk membawa kendaraan bermotor. Selain itu juga dilakukan pengawasan dengan cara swiping. Ketiga, Upaya Represif. Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadinya tindak pidana atau kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman. Dalam hal ini apabila polisi menemukan anak yang

membawa sepeda motor maka polisi akan memberikan tilang terhadap anak tersebut.

B. Saran

1. Saran penulis adalah dalam memberikan pemahaman berlalu lintas sejak dini lebih ditingkatkan agar pengetahuan si anak lebih cepat dicerna dengan baik karena sudah tertanam dari usia dini. Selain itu faktor keluarga dan sekolah sebaiknya lebih berperan aktif agar anak memahami betul akan pengetahuan berlalu lintas sejak dini tanpa ada pendorong dari luar karena salah pergaulan. Peranan orang tua sangat penting di dalam perkembangan anak olehnya itu orang tua seharusnya melakukan

pengawasan yang lebih oleh anak apabila mengendarai kendaraan dan memperhatikan segala kegiatan anak terutama dalam suasana lingkungan yang berada disekitarnya. Selain itu sangat perlu bagi orang tua memberikan wawasan kepada anak mengenai berlalu lintas sesuai prosedur dan undang-undang yang berlaku.

2. Saran penulis dalam upaya penanggulangan ini adalah dari pihak polisi lebih meningkatkan penjagaan diposko dan lebih tegas dalam menindaki pelanggaran lalu lintas tanpa pandang bulu dan berusaha agar dalam menjalankan tugas lebih maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Bisri Ilham, Sistem hukum Indonesia, Jakarta : Grafindo Persada, 1998

Poerwagarnminto, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1989

Rusli Effendy dan Ny. Poppy Andi Lolo, 1989

Soerjono Soekanto 2, Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah – Masalah Sosial, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1989

Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung : Refika Aditama, 2003,

B. Website

<http://ml.scribd.com/doc/58869746/8/Tugas-polisi-Lalu-lintas> diakses pada tanggal 29 november 2014.

C. Peraturan dan Undang-undang

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

UU No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak.

UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

UU NO. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak

UU No. 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia.

Biodata singkat penulis :



Nama : Gusti Ngurah Alit Ardiyasa

Ttl : Buyumpondoli 16 januari 1992

Alamat: Jl. Røeviga Tondo, Palu

Email : alitardiyasa.aa@gmail.com

No Hp : 085256015392